

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada bulan Juni 2025, Provinsi NTT mengalami deflasi sebesar 0,11% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,40% (mtm).

Deflasi terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Sementara itu, kelompok Transportasi dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami peningkatan inflasi. Secara tahunan, pada bulan Juni 2025 Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 1,72% (yoy), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,60% (yoy). Tingkat inflasi tahunan ini tercatat dibawah tingkat inflasi nasional yang sebesar 1,87% (yoy) dan berada di rentang bawah sasaran inflasi nasional sebesar  $2,5 \pm 1\%$  (yoy).

Dari lima Kabupaten/Kota pengukuran inflasi di Provinsi NTT, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Maumere sebesar 0,99% (mtm), sementara deflasi terdalam terjadi di Kab. TTS yang sebesar 0,95% (mtm).

Perhitungan Inflasi Kabuapten Manggarai Timur merujuk pada Kabuapten/Kota IHK terdekat yaitu Kabupaten Ngada terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Ngada sebesar 1,97 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,18.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,03 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,63 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,21 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,09 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,25 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,91 persen; dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,54 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran lain mengalami penurunan, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,76 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,62 persen; kelompok transportasi sebesar 0,42 persen. Sedangkan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Untuk Kabupaten Manggarai Timur sendiri, tercatat perkembangan inflasi yang tercermin melalui volatilitas harga barang kebutuhan pokok masih yang terjaga dan terkendali, permintaan terhadap barang komoditas pokok masih stabil dan berjalan normal. Risiko ke depan yang mungkin di hadapi oleh Kabupaten Manggarai Timur adalah risiko terhadap kenaikan beberapa bahan kebutuhan pokok akibat cuaca ekstri/curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan terjadinya gagal panen komoditas jagung dan beberapa komoditas lainnya, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap rendahnya ketersediaan stok di pasaran sehingga menyebabkan kondisi harga barang kebutuhan pokok akan terganggu.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Belum tersusunya Peta Jalan (*Road Map*) TPID Tahun 2025 - 2027

Kordinasi pengendalian inflasi di daerah belum dapat berjalan baik akibat Peta Jalan (*Road*

*Map*) TPID Kabupaten Manggarai Timur yang belum terbentuk.

- Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran akibat adanya penghematan anggaran dari pusat berdampak pada

kinerja OPD dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan

- Ego Sektoral

Masih tingginya ego sektoral antara OPD yang mengakibatkan kurang berjalannya

kordinasi antara OPD dalam kegiatan-kegiatan pengendalian inflasi di daerah.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah, Kabupaten Manggarai Timur akan menggunakan arahan dan petunjuk dari Rakornas TPID Pusat dan Daerah juga merujuk pada ketentuan-ketentuan yang di berikan oleh TPID Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam program yang telah telah dirumuskan dalam peta jalan pengendalian inflasi di daerah, sebagai evaluasi atas kebijakan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2025 secara rutin setiap bulannya mengikuti Rapat Koordinasi TPID Pusat dan Daerah dan telah beberapa kali melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah Bersama BULOG dalam rangka mengendalikan kenaikan harga bahan pokok khususnya beras.

### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Percepatan Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) Inflasi
- Melaksanakan pemantauan harga komoditas bahan pokok
- Melaksanakan program sidak pasar dan pasar murah
- Menjamin kelancaran distribusi melalui perbaikan akses (jalan, jembatan, pelabuhan) antar kabupaten/ kota.
- Melakukan pemetaan sumber dan ketersediaan pangan masyarakat (Padi dan Jagung).
- Publikasi harga data komoditas pokok secara periodik di media massa atau media lain yang mudah diakses masyarakat.